

**DOKUMEN KELENGKAPAN
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA 2025**

PROVINSI : *Sumatera Utara*

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK/ BELUM ADA	KETERANGAN
1.	Surat Keabsahan dokumen Persyaratan dari BPKAD Provinsi	✓		
2.	Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur	✓		
3.	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD	✓		1 Buku
4.	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	✓		2 Buku
5.	Surat Gubernur mengenai Penyampaian Rancangan Perda Provinsi untuk dibahas bersama DPRD Provinsi	✓		
6.	Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	✓		
7.	Risalah Sidang Jalannya Pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	✓		
8.	Laporan Hasil pemeriksaan BPK yang meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	✓		2 Buku (*)
9.	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi	✓		
10.	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan	✓		
11.	Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan	✓		
12.	Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan	✓		
13.	Laporan perubahan saldo anggaran lebih	✓		
14.	Laporan operasional	✓		
15.	Laporan perubahan ekuitas	✓		
16.	Neraca	✓		
17.	Laporan arus kas	✓		
18.	Catatan atas laporan keuangan	✓		
19.	Daftar rekapitulasi piutang daerah	✓		

20.	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih	✓		
21.	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir	✓		
22.	Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	✓		
23.	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah	✓		
24.	Daftar rekapitulasi aset tetap	✓		
25.	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan	✓		
26.	Daftar rekapitulasi aset lainnya	✓		
27.	Daftar dana cadangan daerah	✓		
28.	Daftar kewajiban jangka pendek	✓		
29.	Daftar kewajiban jangka panjang	✓		
30.	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir TA 2025 dan dianggarkan kembali dalam TA berikutnya	✓		
31.	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	✓		
32.	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah	✓		
33.	Ringkasan Laporan Realisasi APBD	✓		
34.	Penjabaran Laporan Realisasi APBD	✓		
35.	Rekapitulasi Realisasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara	✓		
36.	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang di amanatkan dalam peraturan perundang-undangan (<i>mandatory spending</i>)	✓		
37.	Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	✓		
38.	Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan	✓		
39.	Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas Nasional dengan program prioritas daerah	✓		
40.	Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	✓		
41.	Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan <i>ekstrem</i>	✓		
42.	Rekapitulasi laporan realisasi belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui <i>e-purchasing</i>	✓		
43.	Rekapitulasi laporan realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025	✓		

(*) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK, maka Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.